

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2015–2019

Ilmaa Samara dan Teguh Yuwono

Email : ilmaasmr@gmail.com, teguhyuwonos@yahoo.com

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Accountability is one of the key elements of sustaining Good Governance. Therefore, a Government Agency is said to be able to implement Good Governance if this key element is considered good by the standard that the performance targets that have been determined are based on the needs of the community, as well as the budget that has been allocated in the previous fiscal year.

This study uses a mixed methodology with data collection techniques, namely interviews, data or archives, and questionnaires. After that, the analysis uses triangulation theory, sources and methods. The results show that the increase in the value of performance accountability is not always directly proportional to the substantive performance, although in some sectors it is directly proportional, namely the increase in the value of performance is in accordance with the results felt by the public. Therefore, the government is trying to improve substantive performance with administrative work through innovation, strengthening leadership and strengthening top-down and bottom-up.

These efforts such as innovation, strengthening leadership and strengthening top-down and bottom-up have been able to improve the performance accountability represented by the performance accountability system value of provincial government agencies in Jakarta in the last 5 (five) years, namely 2015–2019.

Researchers recommend to improve the implementation of the efforts made to level up the score of SAKIP, and not only the score of SAKIP but the increasing of substantive performance run by the DKI Jakarta Provincial Government.

Keywords: Accountability, Good Governance, Administrative Work, Substantive Performance.

1. PENDAHULUAN

Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan selalu menjadi pusat perhatian negara karena perannya sebagai Ibu Kota Indonesia.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai implementasi SAKIP

Dalam 5 tahun terakhir pada kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia mengalami peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi – yang selanjutnya disingkat menjadi Kemenpan RB – menjadi perhatian khusus bagi penulis. Pasalnya, pada tahun 2015, Pemprov DKI mendapat skor 58,57 atau setara CC.¹ Di tahun 2016, Pemprov DKI mendapat skor 60,13 atau setara B. Di tahun 2017, Pemprov DKI mendapat skor 62 atau setara B. Di tahun 2018, Pemprov DKI mendapat skor 71,04 atau setara BB², dan di tahun 2019, Pemprov DKI mendapat skor 73,8 atau setara BB dari Kemenpan RB.³

Peneliti memutuskan untuk meneliti akuntabilitas kinerja provinsi DKI Jakarta dari perspektif nilai SAKIP karena berkaca dari pernyataan Deputy bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PAN RB – Muhammad Yusuf Ateh – bahwa SAKIP dapat merepresentasikan komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan *good governance* dan *clean government*⁴. Pimpinan instansi pemerintah terkait harus merubah pola pikir sehingga kedepannya program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Salah satu upaya dalam mencapai cita-cita tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel adalah melalui penerapan SAKIP.

Adanya fenomena peningkatan nilai yang terus menerus pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti faktor pendukung kenaikan skor akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penulis akan meneliti tidak hanya alasan dibalik skor laporan peningkatan kinerja birokrasi, tetapi penulis juga akan meneliti mulai dari pentingnya akuntabilitas dari sudut pandang

¹http://www.beritajakarta.id/read/45029/Akuntabilitas_Kinerja_Pemprov_DKI_Raih_Predikat_B#.XjVIRRMzY4Y

² <https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/239>

³ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-akan-serahkan-rapor-sakip-161-pemda>

⁴ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perbaiki-sakip-tak-cukup-hanya-kerja-tapi-harus-berkinerja>

aparatur pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apakah sebenarnya SAKIP memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, hingga faktor penyebab peningkatan skor SAKIP milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2015–2019.

Pengkajian mengenai penting atau tidaknya faktor akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga alasan meningkatnya skor SAKIP Pemprov DKI perlu dilakukan sehingga kedepannya peningkatan nilai SAKIP tidak hanya berhenti di tahun 2019, tetapi terus mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya karena faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan skor SAKIP akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, dengan harapan peningkatan SAKIP Pemprov DKI dapat segera mencapai nilai AA dan keinginan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* semakin jelas dan nyata, serta besar kemungkinannya untuk dicapai.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-kuantitatif atau *mixed method* dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, data/arsip, dan kuesioner. Informan pada penelitian ini berasal dari birokrat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta dan beberapa perwakilan Biro seperti Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, serta masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 responden. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kawasan instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan triangulasi teori, sumber dan metode.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 *Good Governance*

Suatu tata kelola pemerintahan dapat dikategorikan memiliki tata pemerintahan yang baik atau biasa dikenal sebagai *good governance* jika memenuhi beberapa faktor pelaksanaan *good governance* menurut UNDP dalam Mardiasmo, 2002⁵ :

a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

b. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. *Transparency*, dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.

d. *Responsiveness*, Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

e. *Consensus Orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

g. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)

h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan

i. *Strategic Vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Menurut Mahathir Muhammad, mendefinisikan bahwa *Good Governance* merupakan pelaksanaan dari otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam kaitannya dengan pengelolaan negara.

3.2 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas pada prinsipnya menyatakan bahwa, siapapun adanya, apakah dia perseorangan maupun Lembaga, yang diberi wewenang oleh publik, memakai dan menggunakan fasilitas dan dana yang berasal dari publik, harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas segala sesuatu yang mereka gunakan (Moncrieffe, 2001, hlm. 27).

⁵ Wiwik Andriani. Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang Vol. 10 No. 2 Desember 2015 ISSN 1858-3687 Hal 56

Tanpa adanya pertanggungjawaban, kekuasaan birokrasi akan bersifat *omnipotent* (berkuasa sangat mutlak), *omnipresent* (menguasai segala hal) dan *omninous* (sangat menyebarkan) bagi masyarakat. Menurut Moncrieffe, pada kondisi saat ini, perlu dikembangkan pola akuntabilitas yang memiliki dua dimensi, yakni:⁶

- 1) *ex-post facto accountability*
- 2) *ex-ante accountability*

Ex-post facto accountability mengharuskan pejabat dan Lembaga publik untuk bertanggungjawab atas kewenangan yang ada pada mereka melalui norma hukum, monitoring system, mekanisme anggaran dan juga pemilu. Sedangkan *ex-ante accountability* mengharuskan pejabat publik untuk selalu merepresentasikan keinginan rakyat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil. Birokratur harus selalu mengonsultasikan secara terus-menerus setiap tindakan pada publik, memberikan penjelasan serta informasi yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan para pejabat serta merevisinya bila dipandang perlu.

3.3 PP No. 29 / 2014 dan Permenpan No. 54 /2014

Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.⁷

SAKIP sebagai salah satu media akuntabilitas birokrasi, merupakan kepanjangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sendiri merupakan suatu bentuk tatanan, instrumen serta metode pertanggungjawaban yang memiliki tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Perencanaan Strategik
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

⁶ Setiyono, Budi. 2016.

⁷ Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

⁸ Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 10 No 2 Desember 2015.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang berbicara mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, ditujukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015–2019

Peningkatan nilai implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015–2019 besar dipengaruhi oleh 2 (dua faktor), yakni kedisiplinan ASN dalam menerapkan proses pada SAKIP dan Inovasi yang dibuat oleh birokrat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk faktor kedisiplinan ASN dalam menerapkan proses pada SAKIP, dapat dilihat melalui bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2015–2019, peningkatan nilai implementasi SAKIP tidak lepas dari kedisiplinan ASN dalam menerapkan proses pada SAKIP atau kerja administratif dan kerja substantive dari birokrat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dapat dinilai dari beberapa faktor berikut:

a. Faktor Perencanaan Kinerja: Faktor yang paling berpengaruh pada peningkatan nilai akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena melibatkan peran serta masyarakat dalam proses Musrenbang, juga dipengaruhi oleh RPJMD hasil turunan dari Visi-Misi Gubernur terkait, Renstra, kemudian diturunkan menjadi Sasaran Strategis. Pada LAKIP Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2015–2019, Renstra telah mengacu pada RPJMD, dan telah menggambarkan secara jelas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, Indikator Kinerja serta sasaran dan target jangka menengah. Sasaran strategis juga telah berorientasi pada hasil. Implementasi renstra juga telah digunakan dalam acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan telah dilakukan reviu secara berkala. Dokumen RKT juga telah memuat sasaram, program, indikator, kinerja, sasaran dan target jangka pendek yang telah disusun sebelum mengajukan anggaran, dan sudah selaras dengan dokumen Renstra. Dokumen

Penetapan Kinerja (PK) telah disusun setelah anggaran disetujui yang memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek.

b. Faktor Pengukuran Kinerja: Pada laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015–2019, faktor pengukuran kinerja juga memiliki peran penting dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemprov DKI Jakarta. Beberapa faktor pendukung dalam Pengukuran Kinerja yakni adanya Indikator Kinerja Utama. IKU Unit Kerja telah tercapai untuk disusun sebagai ukuran kinerja secara formal.

c. Faktor Pelaporan Kinerja: Pada laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015–2019, faktor pelaporan kinerja juga memiliki peran penting dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemprov DKI Jakarta. Beberapa faktor pendukung dalam Pelaporan Kinerja yakni ketepatan waktu untuk melakukan pemenuhan laporan pada Kemenpan RB, dimana pada tahun 2015–2019, Pemprov DKI Jakarta berhasil untuk menepati waktu dalam melakukan pelaporan dokumen LAKIP, yang didalamnya telah tersaji kemajuan pencapaian target jangka menengah, dan telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja.

d. Faktor Evaluasi Kinerja: Pada laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015–2019, faktor Evaluasi Kinerja juga memiliki peran penting dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemprov DKI Jakarta. Masing-masing dari LAKIP Pemprov DKI Jakarta 2015–2019, telah dilakukan evaluasi program dan penilaian atas akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan.

e. Faktor Capaian Kinerja: Pada laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015–2019, faktor pelaporan kinerja juga memiliki peran penting dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemprov DKI Jakarta. Masing-masing dari LAKIP Pemprov DKI Jakarta 2015–2019, telah tercapai target kinerja output dan outcome sepenuhnya. Meskipun pada kenyataannya dalam hasil survey yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, pada tahun 2015 dan tahun 2016 dimana terdapat kurang tepatnya penggunaan indikator kinerja untuk pencapaian beberapa sasaran yang menggunakan target *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah tercapainya target *outcome*.

Faktor penyebab peningkatan nilai selanjutnya ialah faktor inovasi. Terlihat dari kehadiran e-SAKIP, dimana e-SAKIP ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta sebagai alat dalam memudahkan implementasi SAKIP. E-SAKIP ditujukan untuk penyederhanaan proses perencanaan serta pengukuran kinerja secara berjenjang serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Serta faktor lain yakni (1) kemudahan akses yang diciptakan untuk melakukan input data; (2) alur komunikasi yang baik dan tidak berbelit; serta (3) cara kepemimpinan baik yang diterapkan oleh masing-masing Kepala Biro.

4.2 Kontribusi SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kehadiran SAKIP memberikan kontribusi positif pada penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dapat dilihat dari peningkatan nilai SAKIP yang secara garis besar menggambarkan peningkatan aspek akuntabilitas pada instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan implikasi positif pada penyelenggaraan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya ialah memberikan sentiment positif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain mendapat sentiment positif, kehadiran SAKIP juga mempengaruhi capaian indeks akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dipengaruhi oleh dengan hadirnya SAKIP, berpengaruh pada adanya pengukuran dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD, adanya penganggaran berbasis kinerja dimana hal ini memudahkan untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung. Serta mengubah paradigma 'kerja' menjadi 'kinerja', juga dapat digunakan sebagai dasar pemberian *rewards and punishment* dan menjadi dasar penentuan bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan mutasi dan rotasi.

Selain inovasi e-SAKIP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang melakukan pengintegrasian *e-budgeting* dan *e-planning* dan mengupayakan konsistensi dalam pelaksanaan.

4.3 Akuntabilitas Menurut Penyelenggara Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Birokrat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Akuntabilitas sebagai elemen paling krusial dan tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah serta aparatur birokrasi dalam membangun pemerintahan yang efisien, efektif dan bebas dari korupsi. Birokrat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang unsur akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi birokrat penyelenggara pemerintahan pada masyarakat. Dapat dilihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, usaha pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan fokus terhadap pelaksanaan akuntabilitas secara lebih baik dari tahun ke tahun direfleksikan dari sasaran serta indikator kinerja yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, dimana pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya berfokus pada Opini Laporan Keuangan Daerah dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan di tahun 2016–2019, Pemprov DKI Jakarta mulai terfokus pada Nilai/Predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditargetkan mendapat predikat BB yang menandakan bahwa suatu Instansi Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menerapkan dan dikatakan sebagai Pemerintah yang Akuntabel, efektif serta efisien.

4.4 Akuntabilitas Menurut Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Masyarakat Provinsi DKI Jakarta memandang akuntabilitas sebagai suatu aspek penting dalam melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah. Meski begitu, pada kenyataannya banyak dari masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang belum mengetahui bahwa tiap tahunnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelaporan akuntabilitas sebagai bentuk media pertanggungjawaban pada masyarakat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah memiliki mekanisme akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Saat dilakukan survey oleh peneliti dalam bentuk kuesioner pada masyarakat Provinsi DKI Jakarta, adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak 2015–2019, berdampak positif pada tingkat kepercayaan dan impresi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam kaitannya dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hanya dilibatkan dalam proses perencanaan yakni pada kegiatan Musrenbang, tanpa pelibatan lebih lanjut dalam proses pengawasan serta penilaian, Masyarakat Provinsi DKI Jakarta belum dijadikan sebagai fokus atensi akuntabilitas kinerja, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terfokus pada akuntabilitas administratif dan belum jauh terfokus pada pekerjaan substantif. Dampaknya adalah masih banyaknya ekspektasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang belum terpenuhi, dimana secara garis besar, masyarakat Provinsi DKI Jakarta lebih terfokus pada hasil *outcome* dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terfokus pada hasil *output* yang telah ditentukan di tahun anggaran sebelumnya.

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Jika disimpulkan, terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan Pemprov DKI Jakarta mengalami peningkatan nilai implementasi SAKIP sebagai representasi akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, faktor pertama yakni kedisiplinan ASN dalam melakukan proses yang tertera dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara baik dan benar menurut SOP yang sudah ada. Faktor kedua yang termasuk kedalam faktor lain yang terdiri dari (1) kemudahan akses yang diciptakan untuk melakukan input data; (2) alur komunikasi yang baik dan tidak berbelit; serta (3) cara kepemimpinan baik yang diterapkan oleh masing-masing Kepala Biro. Serta faktor ketiga yakni dengan adanya inovasi yang dilakukan sebagai *monitoring system* untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni *e-sakip* serta penyederhanaan Sasaran dan Indikator Kinerja menjadi lebih efektif serta efisien tiap tahunnya. Terlihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2015 terdapat 29 Sasaran dan 47 Indikator Kinerja, di tahun 2016 terdapat 21 Sasaran dan 31 Indikator Kinerja, di tahun 2017 terdapat 19 Sasaran Strategis dan 26 Indikator Kinerja, dan di tahun 2018 disederhanakan menjadi 10 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja dan di tahun 2019 menjadi 10 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja.

Dengan adanya penyederhanaan sasaran serta indikator, fenomena ini menjadi faktor yang memengaruhi jumlah program yang dirasa lebih efektif, efisien serta tepat sasaran. Dimana pada tahun 2015 terdapat 50 program, di tahun 2016 terdapat 33 program, di tahun 2017 turun menjadi 29 program, di tahun 2018 menjadi 30 program dan di tahun 2019 terdapat 35 program.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberi dampak positif bagi Instansi Pemprov DKI Jakarta karena dapat menetapkan Anggaran berbasis kinerja, yakni tiap rupiah anggaran instansi Pemerintahan harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Dengan prinsip ini, membuat efek perhitungan tinggi bagi Instansi Pemprov DKI untuk mengeluarkan anggaran di luar kinerja, karena memiliki prinsip semakin besar anggaran harus semakin besar dampak dari kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemprov itu sendiri dan memandang SAKIP sebagai alat untuk penyempurnaan kinerja pemerintah.

5.2 SARAN

Saran peneliti terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana berikut :

a. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses dalam proses kontrol dan evaluasi pada keseluruhan proses akuntabilitas kinerja selain daripada Musrenbang.

- b. Mempercepat pengimplementasian e-evaluasi serta memaksimalkan e-sakip seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah mengingat peningkatan drastis nilai implementasi sakip jawa tengah salah satu nya dipengaruhi oleh implementasi e-sakip yang lebih dulu dibanding Provinsi DKI Jakarta
- c. Peneliti menyarankan untuk dapat diteliti lebih lanjut mengenai akuntabilitas kinerja Pemprov dari segi lebih mendalam selain LAKIP, yakni keseluruhan proses SAKIP.
- d. Peneliti menyarankan jika ingin meneliti faktor peningkatan nilai SAKIP, sebaiknya dimulai dari tingkatan paling rendah yakni tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga akan didapatkan penelitian serta pembahasan yang lebih rinci dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrani, Wiwik. 2015. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang* No. 2 ISSN 1858-3687, 10, 56.
- Cresswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Heridiansyah, Jefri. 2012. *Jurnal STIE Semarang*. No. 2 ISSN 2252-7826, 4, 61.
- Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia.
- Santana, Setiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov DKI 2015–2019.
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015–2019.
- Nurlaela, Wala Siti. 2015. *Pengaruh Good Government Governance dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Survei Pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Rewa, Sangkala. 2015. *Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Putra, John Syah. 2017. *Akuntabilitas Kinerja Pemprov DKI Raih Predikat B*. Jakarta : Berita Jakarta.
http://www.beritajakarta.id/read/45029/Akuntabilitas_Kinerja_Pemprov_DKI_Raih_Predikat_B#.XjVIRRMzY4Y
- Bappeda Provinsi Jakarta. 2018. Pembahasan Perkembangan Peningkatan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov DKI Jakarta.
<https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/239>
- Humas Menpan RB. 2018. Perbaiki SAKIP Tak Cukup Hanya Kerja, Tapi Harus Berkinerja. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perbaiki-sakip-tak-cukup-hanya-kerja-tapi-harus-berkinerja>
- Humas Menpan RB. 2020. Kementerian PANRB Akan Serahkan ‘Rapor’ SAKIP 161 Pemda. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-akan-serahkan-rapor-sakip-161-pemda>
- Tim PPID Inspektorat. 2019. Optimalisasi Implementasi SAKIP Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <http://inspektorat.jakarta.go.id/berita/detail/optimalisasi-implementasi-sakip-pada-pemerintah-provinsi-dki-jakarta>
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2019. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key Performance Indicator Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/INGUB_NO._3_TAHUN_2019.pdf